

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

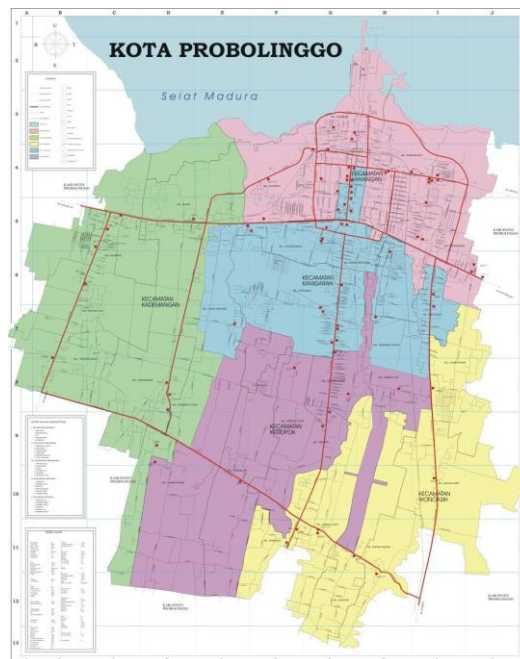
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Probolinggo

a. Sejarah Kota Probolinggo

Gambar 1

Peta Kota Probolinggo



Sumber : Probolinggo dalam angka 2021

Pada zaman Pemerintahan Prabu Radjasanagara (Sri Nata Hayam Wuruk) raja Majapahit yang ke IV (1350-1389), Probolinggo dikenal dengan nama “Banger”, nama sungai yang mengalir di tengah daerah Banger ini. Banger merupakan pedukuhan kecil di bawah pemerintahan Akuwu di Sukodono. Nama Banger dikenal dari buku

Negarakertagama 50 yang ditulis oleh Pujangga Kerajaan Majapahit yang terkenal, yaitu Empu Prapanca.

Sejalan dengan perkembangan politik kenegaraan/kekuasaan pada zaman Kerajaan Majapahit, pemerintahan di Banger juga mengalami perubahan-perubahan/perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Semula merupakan pedukuhan kecil di muara kali Banger, kemudian berkembang menjadi Pakuwon yang dipimpin oleh seorang Akuwu, di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Pada saat Bre Wirabumi (Minakjinggo), Raja Blambangan berkuasa, Banger yang merupakan perbatasan antara Majapahit dan Blambangan, dikuasai pula oleh Bre Wirabumi. Bahkan Banger menjadi kancah perang saudara antara Bre Wirabumi (Blambangan) dengan Prabu Wikramawardhana (Majapahit) yang dikenal dengan "Perang Paregreg". Matar Pada masa Pemerintahan VOC, setelah kompeni dapat meredakan mataram, dalam perjanjian yang dipaksakan kepada Sunan Pakubuwono II di Mataram, seluruh daerah di sebelah Timur Pasuruan (termasuk Banger) diserahkan kepada VOC pada tahun 1743. Untuk memimpin pemerintahan di Banger, pada tahun 1746 VOC mengangkat Kyai Djojolelono sebagai Bupati Pertama di Banger, dengan gelar Tumenggung. Kabupatennya terletak di Desa Kebonsari Kulon. Kyai Djojolelono adalah putera Kyai Boen Djolodrijo (Kiem Boen), Patih Pasuruan. Patihnya Bupati Pasuruan Tumenggung Wironagoro (Untung Suropati). Kompeni (VOC)

terkenal dengan politik adu dombanya. Kyai Djojolelono dipengaruhi, diadu untuk menangkap/membunuh 51 Panembahan Semeru, Patih Tengger, keturunan Untung Suropati yang turut memusuhi kompeni. Panembahan Semeru akhirnya terbunuh oleh Kyai Djojolelono. Setelah menyadari akan kekhilafannya, terpengaruh oleh politik adu domba kompeni, Kyai Djojolelono menyesali tindakannya. Kyai Djojolelono mewarisi darah ayahnya dalam menentang/melawan kompeni. Sebagai tanda sikap permusuhannya tersebut, Kyai Djojolelono kemudian menyingkir, meninggalkan istana dan jabatannya sebagai Bupati Banger pada tahun 1768, terus mengembara/lelono.

Sebagai pengganti Kyai Djojolelono, kompeni mengangkat Raden Tumenggung Djojonegoro, putra Raden Tumenggung Tjondronegoro, Bupati Surabaya ke 10 sebagai Bupati Banger kedua. Rumah kabupatennya dipindahkan ke Benteng Lama. Kompeni tetap kompeni, bukan kompeni kalau tidak adu domba. Karena politik adu domba kompeni, Kyai Djojolelono yang tetap memusuhi kompeni ditangkap oleh Tumenggung Djojonegoro. Setelah wafat, Kyai Djojolelono dimakamkan di pasarean "Sentono", yang oleh masyarakat dianggap sebagai makam keramat.

Di bawah pimpinan Tumenggung Djojonegoro, daerah Banger tampak makin makmur, penduduk tambah banyak. Dia juga mendirikan Masjid Jami' (± Tahun 1770). Karena sangat disenangi

masyarakat, dia mendapat sebutan “Kanjeng Djimat”. Pada tahun 1770 nama Banger oleh Tumenggung Djojonegoro (Kanjeng Djimat) diubah menjadi “Probolinggo” (Probo : sinar, linggo : tugu, badan, tanda peringatan, tongkat). 52 Probolinggo : sinar yang berbentuk tugu, gada, tongkat (mungkin yang dimaksud adalah meteor/bintang jatuh). Setelah wafat Kanjeng Djimat dimakamkan di pasarean belakang Masjid Jami.(BPS Kota Probolinggo, 2019)

b. Kondisi Geografis

Kota Probolinggo merupakan salah satu kota yang berada di daerah tapal kuda di Provinsi Jawa Timur. Letak Kota Probolinggo sekitar 100 km sebelah tenggara Kota Surabaya. Secara Astronomi berada pada $7^{\circ}43'41''$ - $7^{\circ}49'04''$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}10'$ - $113^{\circ}15'$ Bujur Timur.

Batas-batas Wilayah Kota Probolinggo sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Selatan : Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Timur : Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo

Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang menghubungkan daerah-daerah disebelah timur meliputi Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan

Banyuwangi dengan daerah disebelah barat meliputi Pasuruan, Surabaya, dan Malang. Wilayah Kota Probolinggo berada di ketinggian 0 sampai kurang dari 50 meter diatas permukaan laut. Dengan rata-rata ketinggian 10 meter diatas permukaan laut.

Luas wilayah Kota Probolinggo sebesar 56.667 Km², yang terbagi atas lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Secara administrasi pemerintahan, Kota Probolinggo terbagi dalam 5 Kecamatan dan 29 Kelurahan yang terdiri dari Kecamatan Mayangan dengan 5 Kelurahan, Kecamatan Kademangan dengan 6 Kelurahan, Kecamatan Wonoasih dengan 6 Kelurahan, Kecamatan Kedopok dengan 6 Kelurahan, dan Kecamatan Kanigaran dengan 6 Kelurahan. Kota Probolinggo dialiri oleh enam sungai, yaitu Sungai Kedunggaleng, Umbul, Banger, Legundi, Kasbah, dan Pancur. Dengan rata-rata panjang aliran 3,80 Km. Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun, mengalir dari arah selatan ke utara sesuai dengan kelerengan wilayah (BPS Kota Probolinggo, 2019).

c. **Kondisi Demografis**

Jumlah penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo 2010, 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel 4.1.3 dibawah ini:

Tabel 1.2

Jumlah penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Kecamatan Subdistrict	Jumlah Penduduk(ribu) population (<i>thousand</i>)			Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Annual Population Growt Rate (%)	
	2010 ¹	2017 ²	2018 ³	2017-18	2010- 2018 ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kademangan	39.920	44.665	45.322	1.47	13.53
2. Kedopok	30.405	33.944	34.464	1.53	13.35
3. Wonoasih	31.687	33.918	34.193	0.81	7.91
4. Mayangan	60.446	62.909	63.177	0.43	4.52
5. Kanigaran	54.604	57.687	58.505	0.64	6.32
Kota Probolinggo Municipality	217.062	2.33.123	235.211	0.90	8.36

Sumber : Probolinggo dalam angka 2019

Berdasarkan Proyeksi Penduduk Badan Pusat Statistik (BPS,2019), penduduk Kota Probolinggo tahun 2018 sebanyak 235.211 jiwa yang terdiri atas 115.788 jiwa penduduk laki-laki dan 119.423 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk hasil proyeksi penduduk tahun 2017, penduduk Kota Probolinggo mengalami pertumbuhan sebesar 0,01 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 96,96. Artinya setiap 100 orang perempuan setiap 97 orang laki-laki.

Kepadatan penduduk di Kota Probolinggo tahun 2018 mencapai 4.151 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 5 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Mayangan dengan kepadatan sebesar 7.299 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Kedopok sebesar 2.530 jiwa/Km². Rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 3 orang. Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jumlah penduduk menurut status kewarganegaraannya 99,96% penduduk merupakan Warga Negara Indonesia dan lainnya merupakan Warga Negara Asing 0,04% (94 orang). (BPS Kota Probolinggo, 2019).

b. Kependudukan

Sebaran penduduk Kota Probolinggo masih terkonsentrasi di Kecamatan Mayangan. Meskipun secara luas wilayah paling sempit dibanding kecamatan lain yaitu sebesar 15,27 persen dari luas total Kota Probolinggo, namun Kecamatan mayangan dihuni oleh 61 ribu

penduduk atau 25,77 persen dari penduduk Kota Probolinggo. Tahun terakhir juga sudah berkurang, hasil SP2010 konsentrasi penduduk yang tinggal sebesar 27,85 persen. Sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di Kecamatan Kanigaran dengan jumlah penduduk sebesar 60 ribu jiwa atau 25,13 persen dari penduduk Kota Probolinggo. Pergeseran konsentrasi penduduk Kecamatan Kanigaran dalam sepuluh tahun terakhir juga berkurang tetapi dalam jumlah yang relatif sangat sedikit, hasil SP2010 konsentrasi penduduk yang tinggal sebesar 25,16 persen. Sebaran penduduk terkecil ada di Kecamatan Wonoasih dengan jumlah penduduk sebesar 35 ribu jiwa atau 14,69 persen. Posisi konsentrasi penduduk di Kecamatan Wonoasih ini bergeser dibandingkan sepuluh tahun terakhir. Hasil SP 2010, konsentrasi penduduk yang tinggal di Kecamatan Wonoasih menempati urutan keempat terkecil dari lima kecamatan. (BPS Kota Probolinggo, 2020).

c. Pendidikan

Pendidikan Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah masih menemukan kendala di Kota Probolinggo. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tercatat persentase penduduk usia 7-24 tahun menurut partisipasi sekolah sebesar 100 persen untuk kelompok umur 7-12 tahun dan 94,73 persen untuk kelompok umur 13-15 tahun. Artinya tidak seluruh anak usia 7-15 tahun mengenyam pendidikan dasar 9 tahun. Sementara itu partisipasi

sekolah untuk kelompok umur 16-18 tahun sebesar 88,44 persen, dan 35,61 persen untuk kelompok umur 19-24 tahun. Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pada tahun 2019, Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama Kota Probolinggo mencatat pada jenjang SD/MI ada 121 sekolah, 24.776 murid, dan 1.483 guru. SLTP/MTS ada 46 sekolah, 13.487 murid dan 1.039 guru. SLTA Sederajat/MA ada 45 sekolah, 13.350 murid dan 936 guru. Sedangkan untuk perguruan tinggi ada 3 perguruan tinggi, dengan 379 murid dan 75 dosen. (BPS Kota Probolinggo, 2019).

d. Agama

Mayoritas masyarakat Kota Probolinggo beragama Islam 96,89 persen, Kristen Katolik 1,16 %, Protestan 1,43 %, Budha 0,46 %, Hindu 0,05 % dan Lainnya 0,01 %. Seperti kita ketahui bersama bahwa daerah Jawa Timur yang sangat kental dengan keislamannya dan terkenal sebagai basis Nahdatul Ulama khususnya daerah tapal kuda dari wilayah timur Surabaya sampai Kabupaten Banyuwangi. Khususnya di Kota probolinggo masyarakatnya menganut agama islam dilihat dari ada beberapa pondok pesantren dan banyaknya tokoh agama seperti kiyai dan para ustad. Akan tetapi di Kota Probolinggo terjadi hubungan yang sangat harmonis antar agama, hal ini tercermin dari tingginya toleransi antar umat beragama antara umat Islam dan Umat Kristen. (BPS Kota Probolinggo, 2019)

e. Ketenagakerjaan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo tahun 2019, jumlah Angkatan Kerja Kota Probolinggo tahun 2018 sebesar 115.740 orang, dengan 69.476 orang laki-laki (60,03%) dan 46.264 orang perempuan (39,97%). Dari 115.740 orang, 111.527 orang (96,36%) diantaranya bekerja dan 4.213 (3,64%) sisanya merupakan pengangguran. Jumlah pencari kerja terdaftar di Kota Probolinggo pada Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo pada Tahun 2018 sebesar 15.007 orang, terdiri dari 9.937 orang laki-laki dan 5.070 orang perempuan. Dari 15.007 orang yang terdaftar sebesar 562 orang telah ditempatkan bekerja. Dilihat dari pendidikan, lulusan SMA sederajat merupakan yang paling banyak terdaftar sebagai pencari kerja, sebanyak 8.713 orang (60,79%). (BPS Kota Probolinggo, 2019).

2. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo

a. Profil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, kelompok dan masyarakat di kota Probolinggo. Tugas Pokok Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan

bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan teknis bidang sosial. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.

b. Visi dan Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo

1. Visi

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo mempunyai Visi yaitu :

“Membangun bersama rakyat untuk Kota Probolinggo yang lebih baik, berkeadilan, sejahtera, transparan, aman dan berkelanjutan

2. Misi

Sumberdaya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas.

3. Motto

Untuk mewujudkan visi dan misi dimaksud, Dinas Sosial PPPA

Kota Probolinggo memiliki motto sebagai berikut:

H A N D A L:

- **Humanis**
- **Aksistabelitas**
- **Nyaman**
- **Dedikatif**
- **Akuntabilitas**
- **Legalitas**

c. Struktur Organisasi Dinas SosialPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawahi :

» Subbagian Tata Usaha dan

» kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari:

- Sub koordinator Program

- Sub koordinator Keuangan

3. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial,membawahi:

» Kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari:

- Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

- Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial

- Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi :

» Kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari:

- Subkoordinator Penanganan Fakir Miskin
- Subkoordinator Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
- Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :

» Kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari:

- Subkoordinator Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan
- Subkoordinator Pengarusutamaan Gender.

6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Hak Anak, membawahi:

» Kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari:

- Subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Hak Anak
- Subkoordinator Pengarusutamaan Hak Anak.

d. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo

Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pada bidang kesejahteraan masyarakat dan sosial. Rincian tugas dinas sosial diatur oleh Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada Pasal 16A. Serta berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 185 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo terdiri atas: 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yaitu Bidang Rehabilitasi, Pelindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan dan Penanganan Fakir Miskin, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak. Untuk Penyederhanaan Birokrasi, dan untuk menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 27 Mei 2021 Nomor: B/467/KT.01/2021 Perihal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu disesuaikan dan diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Sedangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) antara lain: merumuskan kebijakan, melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial. Adapun yang menjadi kewenangan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo:

- a. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial
- b. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
- c. Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi ke tempat asalnya
- d. Rehabilitasi sosial bukan termasuk korban penyalahgunaan narkoba, dan penderita *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum
- e. Pemeliharaan anak-anak terlantar
- f. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin
- g. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana
- h. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan pembahasan hasil penelitian dengan didasari data yang penulis peroleh selama di lapangan melalui observasi, wawancara, telah dokumentasi serta studi kepustakaan.

Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo dalam menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) yang akan disajikan dengan teknik kualitatif deskriptif dengan tetap mengacu pada interpretasi data. Dari data yang diperoleh dari kegiatan wawancara dengan pihak penyelenggara atau pelaksana dan pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo yang menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA) kota Probolinggo yang menjadi subyek dan obyek dalam mencari data. Selanjutnya data tersebut akan diberikan analisis data yang disesuaikan dengan teori peran melalui beberapa indikator yang dijadikan bahan analisis oleh penulis sehingga dapat disajikan secara sistematis dalam menganalisis data.

1. Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo dalam menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG)

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto yang dimaksud peran yaitu :

1. memberikan arah pada proses sosialisasi
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan
3. Dapat mempersatukan kelompok maupun masyarakat;
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Adapun hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di lapangan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Memberikan Arah Pada Proses Sosialisasi

Yang dimaksud memberikan arah pada proses sosialisasi yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai pemberi arah terhadap Gelandangan Pengemis (GEPENG) selalu memberikan arahan dan bimbingan terhadap tindakan serta perilaku Gelandangan Pengemis (GEPENG) tersebut sangat tidak pantas. Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) merupakan tugas pokok struktur dari organisasi yang berkaitan dengan masalah sosial. Dimana dalam penanganannya perlu bekerja sama dengan Satpol PP.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tujuan mengemis tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan primersaja.

Namun adasekelompok orang mengemis dengan harapan hasilnya dapat dipergunakan untuk memenuhi tuntutan kepuasan pada zat tertentu, contoh: kecanduan bensin. Pelaku sering berdalih bahwa dia sedang mengumpulkan sumbangan untuk pembangunan masjid, padahal uang tersebut hanyadipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Adapula yang memanfaatkan parapenyandang cacat untuk dijadikan pengemis. Mereka mengorganisir sejumlah penyandang disabilitas untuk dipekerjakan, dengan tujuan memperkaya diri sendiri (hasil pengamatan di lapangan). Pengemis yang terjaring penertiban (razia) umumnya berasal dari luar kota Probolinggo atau dari daerah.

Sejatinya merazia Gelandangan Pengemis (GEPENG) bukan sepenuhnya tanggung jawab dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), namun tidak jarang mereka juga ikut bersama Satpol PP, dalam kegiatan ini (peneliti pernah ikut bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA) pada kegiatan pemberian bantuan sosial di Shelter Dinas Sosial Kota Probolinggo). Ini dipertegas oleh Bapak Supagi, S.Sos sebagaibidang rehabilitasijaminan sosial sosial: “Peran dinas sosial dalam penanggulangan Gelandangan Pengemis seharusnya adalah hanya sebagai penerima laporan baik dari Satpol PP, masyarakat terkait masalah sosial. Selanjutnya dilakukan pendekatan mendalam,

memproses serta dilakukan pembinaan mental. Berikut beberapa data yang saya dapat dari bapak Supagi, S.Sos selaku bidang rehabilitasi jaminan sosial, beliau mengungkapkan:

“Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo rutin memberikan arahan pada PMKS terutama Gelandangan Pengemis (GEPENG) dalam bentuk sosialisasi serta pembekalan dan juga memberikan beberapa bantuan seperti dana untuk membuka usaha dan keterampilan-keterampilan lainnya, dengan tujuan agar para gelandangan pengemis tersebut mendapatkan penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-harinya namun dengan cara yang lebih baik dan juga diharapkan agar tujuan ini merubah pola pikir mereka agar tidak kembali turun ke jalan untuk meminta-minta. Tentu tidak mudah melakukannya, banyak sekali Gelandangan Pengemis (GEPENG) yang susah di arahkan karena sebagian besar gelandangan pengemis sudah merasa nyaman dengan profesi mengemis yang sudah rutin mereka lakukan sebagai pemasukan utama mereka, sehingga butuh ketekunan terutama pada proses rehabilitasi serta juga diperlukan kesabaran.” (wawancara dengan Bapak Supagi, S.Sos pada hari Rabu 29 juni 2022).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak

Hermawanto selaku Gelandangan Pengemis, beliau menyatakan bahwa:

“Benar, memang ada sosialisasi serta arahan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), menurut saya penyampaian materi dalam sosialisasi ini mudah dipahami oleh para Gelandangan Pengemis, kita juga mendapatkan beberapa bantuan dari Dinas Sosial kota Probolinggo maupun dari Profinsi kita rutin mendapatkannya.” (wawancara dengan Hermawanto pada hari Rabu 29 juni 2022).

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwasannya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo rutin memberikan arahan dan sosialisasi terhadap Gelandangan Pengemis, dan di dalam sosialisasi tersebut Gelandangan Pengemis diberikan arahan dan juga bantuan dana. Proses arahan serta sosialisai juga dapat di pahami dengan mudah oleh sebagian besar Gelandangan Pengemis (GEPENG) tersebut.

Wawancara selanjutnya mengenai faktor penghambat dan faktor pendukung Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo dalam memberikan arahan serta sosialisasi terhadap Gelandangan Pengemis (GEPENG). Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Supagi, S.Sos selaku bidang rehabilitasi jaminan sosial, beliau mengungkapkan:

“dalam pemberian arahan serta sosialisasi terhadap Gelandangan Pengemis (GEPENG) yang menjadi penghambat yaitu kemauan serta kesadaran dari Gelandangan Pengemis itu sendiri, karena jika dari mereka sendiri yang belum mau merubah standar hidupnya upaya apa saja yang telah diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo akan terasa berat, karena hanya kuat pada satu sisi saja, namun jika mereka sadar dan ingin berubah akan terasa mudah, dan mungkin faktor penghambat yang lain yaitu terbatasnya SDM yang tidak sebanding dengan Gelandangan Pengemis itu sendiri, tidak jarang kami merasa kewalahan karena kurangnya tim yang tidak sebanding dengan Gelandangan Pengemis tersebut. sedangkan faktor pendukungnya yaitu kita difasilitasi Shelter sebagai wadah sekaligus tempat penampungan sementara untuk PMKS terutama Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Shelter inilah kami rutin meberikan sosialisasi serta arahan

kepada gelandangan pengemis tersebut.” (wawancara dengan Bapak Supagi, S.Sos pada hari Rabu 29 juni 2022).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu

Waginiselaku Gelandangan Pengemis, beliau menyatakan bahwa:

“mungkin tidak ada pendapat yang bisa saya sampaikan mengenai faktor penghambat dari proses pengarahan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), karena dari Dinas Sosial Kota Probolinggo telah memberikan upaya yang sudah baik. Saya hanya ingin memberikan saran agar sosialisasi serta arahan ini rutin dilaksanakan agar tercapai hasil yang maksimal dan juga sosialisasi serta arahan ini agar dilakukan secara merata karena masih banyak yang belum diberikan sosialisasi sehingga tidak sedikit yang belum sadar, sedangkan faktor pendukungnya yang bisa saya sampaikan sebagai bagian dari Gelandangan Pengemis (GEPENG) bahwa sebagian sudah antusias dalam pengarahan yang telah diberikan dalam sosialisasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo sehingga proses sosialisasi serta arahan yang diberikan bisa mendapatkan hasil yang maksimal.” (wawancara dengan Ibu Wagini pada hari Rabu 29 juni 2022).

Hasil wawancara diatas menanggapi mengenai faktor penghambat dan faktor pendukung Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo dalam memberikan arahan dan sosialisasi terhadap Gelandangan Pengemis (GEPENG) bahwa terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya SDM yang tidak sebanding dengan Gelandangan Pengemis (GEPENG) dan juga dari kemauan Gelandangan Pengemis (GEPENG) itu sendiri untuk menaikkan taraf hidupnya dan ada juga

saran agar proses arahan dalam sosialisasi ini rutin diselenggarakan dan juga merata.

b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo juga memiliki peran untuk mewariskan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan sebagai upaya bentuk pengendalian dari Gelandangan Pengemis (GEPENG), Pemerintah Kota Probolinggo sendiri pernah menerbitkan Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Kota Probolinggo kepada Gelandangan Pengemis (GEPENG) yang di latar belakang oleh maraknya anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen yang ada di Kota Probolinggo. Regulasi ini menyebutkan bahwa gelandangan dan pengemis termasuk golongan tuna susila, penyalahgunaan NAPZA, ODHA dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan. Pemerintah Kota Probolinggo dan pemerintahan kabupaten/kota berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan sosial untuk pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan. Caranya, dengan memberikan bimbingan agama, mental, fisik dan sosial. Berupa pelayanan pendidikan, pelatihan, kesehatan, kesempatan berusaha, pemulangan ke daerah asal dan pendampingan sosial. Melalui koordinasi bersama

instansiterkait, ulama, aparat kecamatan, desa dan tokoh masyarakat. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Cholisoh, S.Sos sebagai ahli pertama pekerja sosial, beliau mengungkapkan:

“Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo memberikan bimbingan serta pembinaan kepada Gelandangan Pengemis (GEPENG) untuk mewariskan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan. Caranya, dengan memberikan bimbingan agama, mental, fisik dan sosial. Diberikan dalam bentuk pelayanan pendidikan, pelatihan, kesehatan, kesempatan berusaha, pemulangan ke daerah asal dan pendampingan sosial. Melalui koordinasi bersama instansiterkait, ulama, aparat kecamatan, desa dan tokoh masyarakat.” (wawancara dengan Ibu Cholisoh, S.Sos pada hari Rabu 29 juni 2022).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Kusdayanti selaku Gelandangan Pengemis, beliau menyatakan bahwa:

“Benar, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo memberikan bimbingan untuk mewariskan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan kepada Gelandangan Pengemis, Kita sebagai Gelandangan Pengemis (GEPENG) diberikan bimbingan tersebut dalam bentuk pelayanan pendidikan, pelatihan, kesehatan, kesempatan berusaha, pemulangan ke daerah asal dan pendampingan sosial. Melalui koordinasi bersama instansiterkait, ulama, aparat kecamatan, desa dan tokoh masyarakat.” (wawancara dengan Ibu Kusdayanti pada hari Rabu 29 juni 2022).

Dari keseluruhan wawancara yang dilakukan saya mendapatkan kesimpulan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo memiliki beberapa upaya untuk melakukan pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan kepada

Gelandangan Pengemis (GEPENG) upaya yang dilakukan antara lain: memberikan bimbingan agama, mental, fisik dan sosial. Diberikan dalam bentuk pelayanan pendidikan, pelatihan, kesehatan, kesempatan berusaha, pemulangan ke daerah asal dan pendampingan sosial. Melalui koordinasi bersama instansi terkait, ulama, aparat kecamatan, desa dan tokoh masyarakat.

Wawancara selanjutnya mengenai faktor penghambat dan faktor pendukung Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo dalam upaya untuk melakukan pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan kepada Gelandangan Pengemis (GEPENG). Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Cholisoh, S.Sos selaku ahli pertama pekerja sosial, beliau mengungkapkan:

“Lemahnya payung hukum yang mengatur tentang larangan mengemis, membuat masyarakat menjadikan kegiatan mengemis sebagai profesi. Sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi mereka yang sudah pernah terjaring razia. Setelah dipulangkan ke daerah masing-masing, banyak juga yang kemudian kembali ke Probolinggo untuk melanjutkan aktifitas mengemisnya lagi. Alasan lain adalah, penghasilan pengemis ternyata cukup menggiurkan. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu Gelandangan Pengemis (GEPENG) ikut berpartisipasi aktif dalam pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan sehingga hasil yang didapatkan juga maksimal.” (wawancara dengan Ibu Cholisoh, S.Sos pada hari Rabu 29 juni 2022).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Darmawan selaku Gelandangan Pengemis, beliau menyatakan bahwa:

“faktor penghambat dalam hal ini menurut saya terlalu banyak melibatkan banyak peran penting untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti: instansi terkait, ulama, aparat kecamatan, desa dan tokoh masyarakat, sedangkan faktor pendukungnya malah sebaliknya jika semua dapat aktif berpartisipasi hasil yang maksimal bukan hal yang sulit untuk didapatkan.” (wawancara dengan Bapak Darmawan pada hari Rabu 29 juni 2022).

Dari keseluruhan wawancara yang dilakukan saya mendapatkan kesimpulan bahwa upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo untuk pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan memiliki faktor penghambat terlalu banyak melibatkan banyak peran penting untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti: instansi terkait, ulama, aparat kecamatan, desa dan tokoh masyarakat, Gelandangan Pengemis tidak mendapatkan efek jera bagi mereka yang sudah pernah terjaring razia. Setelah dipulangkan ke daerah masing-masing, banyak juga yang kemudian kembali ke Kota Probolinggo untuk melanjutkan aktifitas mengemisnya lagi. Alasan lain adalah, penghasilan pengemis ternyata cukup menggiurkan. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu, Gelandangan Pengemis (GEPENG) ikut berpartisipasi aktif dalam pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan sehingga hasil yang didapatkan juga maksimal.

c. Dapat mempersatukan kelompok maupun masyarakat

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo dapat mempersatukan kelompok maupun masyarakat, dalam poin ini Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo dalam menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo dapat diwujudkan dalam bentuk koordinasi pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melakukan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan kehidupannya secara jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Dalam hal ini Gelandangan Pengemis (GEPENG) sangat sulit diterima maupun membaaur dengan masyarakat sekitar, oleh karena itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo dapat menyatukan Gelandangan Pengemis (GEPENG) dengan masyarakat melalui program-programnya. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Primadita Wulandari, S.Sos sebagai ahli pertama pekerja sosial, beliau mengungkapkan:

“Dengan adanya harapan melalui pembinaan dan proses sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo dan dukungan dari pemerintah daerah serta masyarakat terkait dengan Gelandangan Pengemis (GEPENG) yang perlu terus dilakukan, agar kemandirian dan kesejahteraan dalam kehidupan khususnya mereka para gelandangan pengemis yang bersangkutan agar tercipta kemampuan dan kekuasaan akan dirinya untuk aktif dan ikut serta dalam kehidupan bermasyarakat melalui penguatan kapasitas diri dengan memanfaatkan kemampuan yang pernah di berikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo sehingga tercipta kemandirian. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo baik melalui program maupun upaya-upaya pemberdayaan dilakukan untuk mewujudkan taraf hidup yang lebih baik bagi mereka yang terjaring razia. Semua hal kegiatan maupun program-program yang diciptakan tersebut untuk membantu dan merubah kehidupan para Gelandangan Pengemis (GEPENG) dari yang belum memiliki pengetahuan dan kemampuan menjadi memiliki kemampuan serta pengetahuan. Hal tersebut akan terlaksana dengan baik apabila masyarakat yang diberdayakan dan pemerintah sebagai aktor pemberdaya turut berpartisipasi aktif untuk melakukan perubahan yang nyata dalam kehidupannya.” (wawancara dengan Ibu Primadita Wulandari, S.Sos pada hari Rabu 29 juni 2022).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rahmadiselaku Gelandangan Pengemis, beliau menyatakan bahwa:

“Benar mas, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo memberikan program maupun upaya-upaya pemberdayaan kepada Gelandangan Pengemis (GEPENG) agar tercipta kemampuan dan kekuasaan akan dirinya untuk aktif dan ikut serta dalam kehidupan bermasyarakat melalui penguatan kapasitas diri dengan memanfaatkan kemampuan yang pernah di berikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo sehingga tercipta kemandirian.” (wawancara dengan Bapak Rahmadi pada hari Rabu 29 juni 2022).

Dari keseluruhan wawancara yang dilakukan saya mendapatkan kesimpulan bahwa melalui pembinaan dan proses sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo dan dukungan dari pemerintah daerah serta masyarakat terkait dengan Gelandangan Pengemis (GEPENG) yang perlu terus dilakukan, agar kemandirian dan kesejahteraan dalam kehidupan khususnya mereka para gelandangan pengemis yang bersangkutan agar tercipta kemampuan dan kekuasaan akan dirinya untuk aktif dan ikut serta dalam kehidupan bermasyarakat melalui penguatan kapasitas diri dengan memanfaatkan kemampuan yang pernah di berikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo sehingga tercipta kemandirian. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo baik melalui program maupun upaya-upaya pemberdayaan dilakukan untuk mewujudkan taraf hidup yang lebih baik bagi mereka yang terjaring razia. Semua hal kegiatan, upaya maupun program-program yang diciptakan tersebut untuk membantu dan merubah kehidupan para Gelandangan Pengemis (GEPENG) dari yang belum memiliki pengetahuan dan kemampuan menjadi memiliki kemampuan serta pengetahuan.

Wawancara selanjutnya mengenai faktor penghambat dan faktor pendukung Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo dalam upaya mempersatukan kelompok maupun masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Primadita Wulandari, S.Sos selaku ahli pertama pekerja sosial, beliau mengungkapkan:

“yang membuat kami kesulitan dalam perihal mempersatukan kembali dan melibatkan Gelandangan Pengemis (GEPENG) agar dapat kembali diterima oleh masyarakat yaitu image dari Gelandangan Pengemis (GEPENG) itu sendiri sudah terlanjur sulit untuk diterima oleh masyarakat, beberapa mungkin sudah dapat berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik namun tidak sedikit yang masih sulit untuk merubah diri mereka, sedangkan faktor pendukungnya yaitu Gelandangan Pengemis banyak yang sudah bisa memerankan dirinya dengan baik di lingkungan masyarakat sehingga upaya ini nantinya dapat di optimalkan kembali oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo.” (wawancara dengan Ibu Primadita Wulandari, S.Sos pada hari Rabu 29 juni 2022).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Yantiselaku Gelandangan Pengemis, beliau menyatakan bahwa:

“Tidak ada faktor penghambat yang bisa saya jelaskan, bagi saya upaya ini sudah sangat baik dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo, karena dari saya sendiri ingin sekali membaur dengan masyarakat disekitar dan diterima dengan baik. Dengan upaya ini, besar kesempatan saya untuk dapat diterima oleh masyarakat.” (wawancara dengan Ibu Yanti pada hari Rabu 29 juni 2022).

Dari keseluruhan wawancara yang dilakukan saya mendapatkan kesimpulan bahwa upaya dapat mempersatukan kelompok maupun masyarakat dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo terhadap Gelandangan Pengemis (GEPENG) memiliki faktor

penghambat yaitu kesulitan dalam perihal mempersatukan kembali dan melibatkan Gelandangan Pengemis (GEPENG) agar dapat kembali diterima oleh masyarakat yaitu image dari gelandangan pengemis itu sendiri sudah terlanjur sulit untuk diterima oleh masyarakat, karena tidak sedikit yang masih sulit untuk merubah diri mereka.

d. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo juga memiliki peran menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat dalam peranan ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo memiliki kontrol terbesar dalam mengendalikan serta menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di jalanan sebab Gelandangan Pengemis (GEPENG) dapat mengganggu keindahan kota terutama di Kota Probolinggo, Gelandangan Pengemis (GEPENG) juga selalu mencari kesempatan dan beberapa memang sulit untuk dikendalikan meskipun sudah pernah terjaring razia, namun upaya dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo tidak berhenti begitu saja, banyak cara serta program yang sampai saat ini masih dikembangkan serta di optimalkan.

Dengan tuntasnya serta keefektifan program dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo dalam upaya penanganan Gelandangan Pengemis (GEPENG) dan permasalahan kesenjangan sosial lainnya dapat melestarikan kehidupan di masyarakat terutama di Kota Probolinggo. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Primadita Wulandari, S.Sos sebagai ahli pertama pekerja sosial, beliau mengungkapkan:

“banyak cara serta program yang sampai saat ini masih dikembangkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo, usaha represif dimaksudkan untuk mengurangi dan atau meniadakan Gelandangan Pengemis (GEPENG) yang ditujukan untuk mengurangi Gelandangan Pengemis (GEPENG) di jalan raya. Ketika upaya yang dilakukan mungkin masih dihiraukan maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo dapat menegakkan peraturan daerah melalui upaya koersif. Pelaksanaan penertiban maupun pengaduan dimana untuk melestarikan kehidupan masyarakat dilakukan pada hari-hari besar rutin dilakukan operasi penertiban/razia dan penjangkauan gelandangan dan pengemis yang mana gelandangan pengemis kerap muncul. Dengan tuntasnya serta keefektifan program dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam upaya penanganan Gelandangan Pengemis (GEPENG) dan permasalahan kesenjangan sosial lainnya dapat melestarikan kehidupan di masyarakat terutama di Kota Probolinggo.” (wawancara dengan Ibu Primadita Wulandari, S.Sos pada hari Rabu 29 juni 2022).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Komariah selaku Gelandangan Pengemis, beliau menyatakan bahwa:

“Benar, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) rutin melakukan operasi penertiban/razia, karena sering melakukan razia saya sudah kapok, takut terjaring razia kembali kalo sedang mengemis.” (wawancara dengan Ibu Komariah pada hari Rabu 29 juni 2022).

Dari keseluruhan wawancara yang dilakukan saya mendapatkan kesimpulan bahwa banyak cara serta program yang sampai saat ini masih dikembangkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo, usaha represif dimaksudkan untuk mengurangi dan atau meniadakan Gelandangan Pengemis (GEPENG) yang ditujukan untuk mengurangi Gelandangan Pengemis (GEPENG) di jalan raya. Ketika upaya yang dilakukan mungkin masih dihiraukan maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo dapat menegakkan peraturan daerah melalui upaya koersif. Pelaksanaan penertiban maupun pengaduan dimana untuk melestarikan kehidupan masyarakat dilakukan pada hari-hari besar rutin dilakukan operasi penertiban/razia dan penjangkauan gelandangan dan pengemis yang mana gelandangan pengemis kerap muncul.

Wawancara selanjutnya mengenai faktor penghambat dan faktor pendukung Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo dalam upaya menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat Hal tersebut diungkapkan oleh

Ibu Primadita Wulandari, S.Sos selaku ahli pertama pekerja sosial, beliau mengungkapkan:

“dari faktor penghambat sendiri sampai saat ini mungkin dalam hal Gelandangan Pengemis (GEPENG) yang masih sangat sulit untuk kami kontrol dan kendalikan sehingga kami merasa sangat kuwalahan untuk dapat melestarikan kehidupan antara gelandangan pengemis dengan masyarakat, sedangkan dari faktor pendukungnya yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo memiliki beberapa program yang telah dilakukan dalam upaya menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) sebagai berikut:

Upaya Preventif; Pelatihan ketrampilan jika pengemis berasal dari Kota Probolinggo maka beban tugas diberikan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan dinas tenaga kerja kota Probolinggo. Jika pengemis berasal dari luar daerah, maka beban tugas diberikan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan tenaga kerja propinsi; Pelayanan kesehatan diberikan oleh dinas kesehatan baik Kota Probolinggo maupun propinsi, apabila setelah dilakukan assesment terdapat pengemis yang memiliki penyakit; Penyuluhan dan edukasi masyarakat dilakukan oleh dinas sosial dan dinas tenaga kerja Kota Probolinggo, dengan memajang himbauan larangan untuk tidak melakukan kegiatan mengemis dan tidak memberi uang kepada pengemis.

Upaya Koersif: Penertiban yang dilakukan oleh satpol PP terhadap; Pengemis pada beberapa titik: tempat wisata, pasar, dan lampu lalu lintas; Pembinaan spiritual dilakukan pada rumah singgah sementara oleh dinas syariat Islam, dengan memberikan siraman rohani, guna menyadarkan pengemis bahwa kegiatan mengemis dilarang oleh negara dan agama; Merujuk pengemis yang berasal dari luar Kota Probolinggo kepada instansi terkait

Rehabilitasi: Latihan fisik berat, sebagai bentuk hukuman juga, agar pengemis merasa jera; Penampungan di rumah singgah sementara, selama gelandangan pengemis mendapatkan pembinaan; Pelayanan aksesibilitas dan rujukan ke rumah sakit jiwa, apabila ada indikasi kelainan jiwa.

Reintegrasi Sosial: Koordinasi dengan pemerintah daerah asal, pelaporan kepada dinas sosial daerah dan kepada pekerja sosial tingkat kecamatan asal pengemis; Penelusuran keluarga dilakukan oleh pihak terkait yang telah diberikan laporan oleh pihak dinas sosial; Penyerahan pengemis kepada keluarga dilakukan oleh dinas sosial Kota Probolinggo sebagai pemberi arahan kepada keluarga untuk memperingatkan, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.” (wawancara dengan Ibu Primadita Wulandari, S.Sos pada hari Rabu 29 juni 2022).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Samsul Arifin selaku Gelandangan Pengemis, beliau menyatakan bahwa:

“Tidak ada faktor penghambatnya menurut saya, bagi saya hal ini telah dilakukan secara matang oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo dengan harapan mendapatkan hasil yang sungguh maksimal, dengan melakukan razia yang rutin hingga seluruh jalanan hingga tempat yang jarang diadakan razia mereka datang, hal itu juga dapat saya golongan kedalam faktor pendung.” (wawancara dengan Bapak Samsul Arifin pada hari Rabu 29 juni 2022).

Dari keseluruhan wawancara yang dilakukan saya mendapatkan kesimpulan bahwa upaya Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo terhadap Gelandangan Pengemis (GEPENG) memiliki faktor penghambat seperti yang telah diungkapkan oleh salah satu informan yaitu Bapak Samsul Arifin karena dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo telah merancang beberapa upaya serta program secara matang dengan tujuan mendapatkan hasil yang maksimal.

2. Faktor pendukung dan penghambat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo dalam menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo

Selain perlunya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam penyelesaian masalah Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo. Adapun beberapa dukungan pemerintah diwujudkan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Keterlibatan Satpol PP dalam membantu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo dalam menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG).
- b. Sumber daya manusia (SDM) sebagai pengelola rumah singgah sementara (Shelter).
- c. Sarana dan prasarana di rumah singgah sementara (Shelter).

Kelompok masyarakat yang sadar bahwa jika ingin bersedekah, maka salurkanlah ke Baitul Mal untuk dikelola dengan jelas, dari pada memberikan uang kepada Gelandangan Pengemis (GEPENG). Namun demikian, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(PPPA) Kota Probolinggo dalam menanggulangi permasalahan pengemis, antara lain:

- a. Masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan himbauan serta larangan agar tidak memberikan sedekah kepada pengemis. Karena hal tersebut yang dapat membuat semakin menjamurnya para Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo.
- b. Terbatasnya rumah singgah (Shelter) serta pengelola bagi para Gelandangan Pengemis (GEPENG) sehingga daya tampung yang kurang memadai dari pada jumlah Gelandangan Pengemis (GEPENG) itu sendiri.

C. Analisis dan Interpretasi Data

Pada bagian ini penulis akan menyajikan dan memaparkan hasil penelitian di lapangan sesuai data dan fakta serta disesuaikan dengan teori yang digunakan sebagai bahan rujukan untuk menjawab dari rumusan masalah penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengkonfirmasi dan membandingkan dengan teori yang digunakan oleh penulis untuk menghasilkan data kesimpulan yang tepat dan objektif.

1. Peran Dinas SosialPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)Kota Probolinggo dalam menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo

a. Memberikan Arah Pada Proses Sosialisasi

Yang dimaksud memberikan arah pada proses sosialisasi yaitu memberikan arah terhadap Gelandangan Pengemis (GEPENG) terhadap tindakan serta perilaku Gelandangan Pengemis (GEPENG). Beberapa strategi yang dilakukan Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo guna menggugah rasa iba targetnya, antara lain: dari pintu ke pintu, menggendong bayi, membawa proposal fiktif, menunggu di warung-warung, berkeliling di seputaran mesjid, terminal, persimpangan lampu lalu lintas, berpura-pura cacat, bahkan ada yang nekat memanfaatkan momen tertentu seperti bencana alam, dengan membawa kardus seolah sedang melakukan penggalangan dana. Tujuan dari pemberian arahan pada proses sosialisasi adalah untuk memberikan kesadaran kepada pengemis dan memberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat kepada para pengemis agar dapat dijadikan sebagai pengetahuan.

Selain itu setelah proses pendataan, langkah selanjutnya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) kota Probolinggo dalam program penanggulangan pengemis adalah pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial, yang terdiri dari beberapa program berikut:

- a. Program komunikasi informasi edukasi (KIE) dan kampanye sosial bagi PMKS, khususnya Gelandangan Pengemis (GEPENG). Bentuknya adalah kampanye

memajang larangan tentang memberi uang kepada pengemis.

- b. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitas kesejahteraan sosial PMKS. Dilakukan melalui pendekatan dengan Gelandangan Pengemis (GEPENG) untuk mengetahui latar belakang mereka mengemis dan meningkatkan sarana yang ada di rumah singgah, yang merupakan tempat dilakukannya pembinaan mental, fisik dan religi kepada Gelandangan Pengemis (GEPENG), agar tidak kembali turun di jalan.
- c. Penanganan masalah-masalah strategis yang cepat tanggap. Ini merupakan tindak lanjut, jika terdapat pengemis yang memiliki kelainan masalah, seperti adanya tekanan dari pihak tertentu.

Adapun beberapa program yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) kota Probolinggo dalam upaya menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

- a. Pelatihan keterampilan jika pengemis berasal dari Kota Probolinggo maka beban tugas diberikan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan

dinas tenaga kerja kota Probolinggo. Jika pengemis berasal dari luardaerah, maka beban tugas diberikan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan tenaga kerja provinsi

b. Pelayanan kesehatan diberikan oleh dinas kesehatan baik kota Probolinggo maupun provinsi, apabila setelah dilakukan assesement terdapat pengemis yang memiliki penyakit.

c. Penyuluhan dan edukasi masyarakat dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo, dengan memajang himbauan larangan untuk tidak melakukan kegiatan mengemis dan tidak memberi uang kepada pengemis.

2. Upaya Koersif

a. Penertiban yang dilakukan oleh satpol PP terhadap

b. Pengemis pada beberapa titik: tempat wisata, pasar, dan lampu lalu lintas.

c. Pembinaan spiritual dilakukan pada rumah singgah sementara oleh dinas syariat Islam, dengan memberikan dakwah, guna menyadarkan pengemis bahwa kegiatan mengemis dilarang oleh negara dan agama.

d. Merujuk pengemis yang berasal dari luar Kota Probolinggo kepada instansi terkait

3. Rehabilitasi

- a. Latihan fisik berat, sebagai bentuk hukuman juga, agar pengemis merasa jera.
- b. Penampungan di rumah singgah sementara, selama pengemis mendapatkan pembinaan
- c. Pelayanan aksesibilitas dan rujukan ke rumah sakit jiwa, apabila ada indikasi kelainan jiwa.

4. Reintegrasi Sosial

- a. Koordinasi dengan pemerintah daerah asal, pelaporan kepada dinas sosial daerah dan kepada pekerja sosial tingkat kecamatan asal pengemis.
- b. Penelusuran keluarga dilakukan oleh pihak terkait yang telah diberikan laporan oleh pihak dinas sosial.
- c. Penyerahan pengemis kepada keluarga dilakukan oleh dinas sosial Kota Probolinggo sebagai pemberi arahan kepada keluarga untuk memperingatkan, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Dinas SosialPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)dan Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo telah berupaya menerbitkan aturan yang melarangwarga memberikan sumbangankepadaGelandangan Pengemis. Seruan ini dipasang di berbagai lokasi para pelaku Gelandangan Pengemis melakukan aksinya. Himbauan ini memuat beberapa point, yaitu: warga diingatkan agar tidak memberikan fasilitas dan ruang aktifitas kepada gelandangan dan pengemis di tempat-tempat usaha. Jika pemilik usaha atau masyarakat mengalami kendala dalam upaya mempertegas larangan ini, maka pemilik usaha dan masyarakat diminta melaporkepada Satpol PP, WH atau Disnaker Kota Probolinggo. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk tidak melayani gelandangan pengemis di jalanan, perempatan lampu lalu lintas untuk menertibkan para pengemis.

Untuk alokasi waktu pembinaan bagi pengemis adalah selama 3 hari. Setelah itu, mereka membuat perjanjian dengan pihak dinas sosial untuk tidak mengulangi kegiatan mengemis kembali. Jika mereka terjaringkembali,maka masa pembinaannya akan dilipat gandakan. Lemahnya sanksi yang diberikan juga membuat pengemis tidak khawatir jika harus kembali mengemis dan tertangkap kembali.

b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan

Lemahnya payung hukum yangmengatur tentanglarangan mengemis, membuat masyarakat menjadikan kegiatan mengemis

sebagai profesi. Sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi mereka yang sudah pernah terjaring razia. Setelah dipulangkan ke daerah masing-masing, banyak juga yang kemudian kembali ke Probolinggo untuk melanjutkan aktifitas mengemisnya lagi. Alasan lain adalah, penghasilan pengemis ternyata cukup menggiurkan.

Fenomena ini menegaskan bahwa suburnya kegiatan mengemis merupakan hasil dari hubungan timbal balik (ada yang meminta dan ada yang memberi). Pada saat peneliti mengikuti kegiatan dari program pemberian sembako untuk PMKS di Shelter pada hari Rabu 29 juni 2022 peneliti mewawancarai salah satu Gelandangan Pengemis (GEPENG) Gelandangan Pengemis yang peneliti wawancarai, beliau mengaku sering mengemis setiap harinya di beberapa wilayah kota Probolinggo demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya namun penampilan beliau dapat dikatakan jauh dari kata “kekurangan” dengan beberapa perhiasan yang beliau kenakan ketika menghadiri program bantuan beliau menceritakan bahwa setiap harinya beliau berkeliling, mendatangi dari rumah ke rumah dengan membawa anak kecil yang beliau sebut ialah cucunya, beliau juga mengatakan memiliki pendapatan perharinya paling sedikit 100 ribu dari mengemis tersebut. Kebiasaan tersebut tentu menjadi tradisi yang membuat pengemis malas untuk melakukan pekerjaan yang lain.

Ketertiban Umum Kota Probolinggo kepada pengamen dan pengemis yang di latar belakang oleh maraknya anak jalanan,

gelandangan pengemis dan pengamen yang ada di Kota Probolinggo. Regulasi ini menyebutkan bahwa gelandangan dan pengemis termasuk golongan tuna susila, penyalahgunaan NAPZA, ODHA dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan. Pemerintah kota Probolinggo dan pemerintahan kabupaten/kota berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan sosial untuk pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan. Caranya, dengan memberikan bimbingan agama, mental, fisik dan sosial. Berupa pelayanan pendidikan, pelatihan, kesehatan, kesempatan berusaha, pemulangan ke daerah asal dan pendampingan sosial.

c. Dapat mempersatukan kelompok maupun masyarakat

Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dalam Menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo yakni untuk mempersatukan kelompok maupun masyarakat dengan melalui koordinasi pemerintah dengan masyarakat. Dalam hal ini Gelandangan Pengemis (GEPENG) sangat sulit diterima maupun membaur dengan masyarakat sekitar, oleh karena itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dapat menyatukan Gelandangan Pengemis (GEPENG) dengan masyarakat melalui program-programnya. Dengan adanya harapan melalui pembinaan dan proses sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo dan dukungan dari pemerintah daerah serta masyarakat

terkait dengan Gelandangan Pengemis (GEPENG) yang perlu terus dilakukan, agar kemandirian dan kesejahteraan dalam kehidupan khususnya mereka para pengemis yang bersangkutan agar tercipta kemampuan dan kekuasaan akan dirinya untuk aktif dan ikut serta dalam kehidupan bermasyarakat melalui penguatan kapasitas diri dengan memanfaatkan kemampuan yang pernah di berikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo sehingga tercipta kemandirian.

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo baik melalui program maupun upaya-upaya pemberdayaan dilakukan untuk mewujudkan taraf hidup yang lebih baik bagi mereka yang terjaring razia. Semua hal kegiatan maupun program-program yang diciptakan tersebut untuk membantu dan merubah kehidupan para pengemis dan gelandangan dari yang belum memiliki pengetahuan dan kemampuan menjadi memiliki kemampuan. Hal tersebut akan terlaksana dengan baik apabila masyarakat yang diberdayakan dan pemerintah sebagai aktor pemberdaya turut berpartisipasi aktif untuk melakukan perubahan yang nyata dalam kehidupannya.

d. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat

Dinas Sosial juga memiliki peran menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan

masyarakat banyak cara serta program yang sampai saat ini masih dikembangkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo, usaha represif dimaksudkan untuk mengurangi dan atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan untuk mengurangi gelandangan dan pengemis di jalan raya.

Ketika upaya yang dilakukan mungkin masih dihiraukan maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dapat menegakkan peraturan daerah melalui upaya koersif. Pelaksanaan penertiban maupun pengaduan dimana untuk melestarikan kehidupan masyarakat dilakukan pada hari-hari besar rutin dilakukan operasi penertiban/razia dan penjangkauan gelandangan dan pengemis yang mana gelandangan pengemis kerap muncul.

Dengan tuntasnya serta keefektifan program dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo dapat melestarikan kehidupan di masyarakat terutama di Kota Probolinggo.

2. Faktor pendukung dan penghambat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo dalam menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo

Pada faktor pendukung dan faktor penghambat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo

peneliti mewawancarai Ibu Primadita Wulandari, S.Sos selaku ahli pertama pekerja sosial, beliau mengungkapkan:

“Selain perlunya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dinassosial juga membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam penyelesaian masalah Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo. Adapun beberapa dukungan pemerintah diwujudkan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Memperlibatkan banyak peran penting dalam membantu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG).
- b. Sumber daya manusia sebagai pengelola rumah singgah sementara (Shelter).
- c. Sarana dan prasarana di rumah singgah sementara (Shelter).

Kelompok masyarakat yang sadar bahwa jika ingin bersedekah, maka salurkanlah ke Baitul Mal untuk dikelola dengan jelas, dari pada memberikan uang kepada pengemis.

Namun demikian, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) kota Probolinggo dalam menanggulangi permasalahan pengemis, antara lain:

- a. Masih banyak masyarakat yang belum mengindahkan himbauan maupun larangan untuk tidak memberikan sedekah kepada pengemis. Sehingga membuat semakin menjamurnya para Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo.
- b. Terbatasnya rumah singgah sementara (Shelter) bagi para Gelandangan Pengemis (GEPENG) sehingga daya tampung yang kurang memadai dari pada jumlah Gelandangan Pengemis (GEPENG) itu sendiri.”
(wawancara dengan Ibu Primadita Wulandari, S.Sos pada hari Rabu 29 juni 2022).

Kesimpulan dari wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu Primadita Wulandari, S.Sos bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo memiliki faktor pendukung seperti:

- a. Memperlibatkan banyak peran penting dalam membantu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG).
- b. Sumber daya manusia sebagai pengelola rumah singgah sementara (Shelter).
- c. Sarana dan prasarana di rumah singgah sementara (Shelter).

Banyak terdapat peranan penting yang terlibat untuk membantu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo dalam upaya menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) seperti kerjasama dengan Satpol PP, sejatinya merazia Gelandangan Pengemis (GEPENG) bukan sepenuhnya tanggung jawab dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), namun tidak jarang mereka juga ikut bersama Satpol PP. Peran dinas sosial dalam penanggulangan Gelandangan Pengemis (GEPENG) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) seharusnya hanya sebagai wadah penerima laporan baik dari Satpol PP, masyarakat terkait masalah sosial. Selanjutnya dilakukan pendekatan mendalam, memproses serta dilakukan pembinaan mental, dengan banyaknya peran penting yang terlibat untuk mebanu upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) hasil yang didapatkan juga maksimal.

Sumber daya manusia sebagai pengelola rumah singgah sementara (Shelter) juga bentuk faktor pendukung dari Pemerintah untuk menunjang upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) rumah singgah sementara (Shelter) dapat digunakan sebagai tempat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk bersosialisasi serta memberi arahan kepada PMKS terutama Gelandangan Pengemis (GEPENG) serta dapat juga berfungsi sebagai para Gelandangan Pengemis (GEPENG) untuk rehabilitasi dan tempat untuk mengembangkan potensi diri agar dapat mengoptimalkan kualitas kehidupan mereka di dalam masyarakat. Sedangkan faktor penghambat dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) seperti yang telah di ungkapkan oleh Ibu Primadita Wulandari, S.Sos yaitu:

- a. Masih banyak masyarakat yang belum mengindahkan himbauan maupun larangan untuk tidak memberikan sedekah kepada pengemis. Sehingga membuat semakin menjamurnya para Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo.
- b. Terbatasnya rumah singgah sementara (Shelter) bagi para Gelandangan Pengemis (GEPENG) sehingga daya tampung yang kurang memadai dari pada jumlah Gelandangan Pengemis (GEPENG) itu sendiri.

Lemahnya payung hukum yang mengatur tentang larangan mengemis, membuat masyarakat menjadikan kegiatan mengemis sebagai profesi. Sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi mereka yang sudah pernah terjaring razia. Setelah dipulangkan ke daerah masing-masing, banyak juga yang kemudian kembali ke Probolinggo untuk melanjutkan aktifitas mengemisnya lagi. Alasan lain adalah penghasilan pengemis ternyata cukup menggiurkan.